



Representasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam pemberitaan Detik.com

Rofingatul Hamidah^{1*}, Tyas Retno Wulan², Arizal Mutahir³

^{1*,2,3} Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto – Indonesia

^{1*}rofihamidah@gmail.com, ²tyas.wulan@unsoed.ac.id, ³arizal_mutahir@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim December 8, 2022

Direvisi May 28, 2023

Terbit June 1, 2023

Keywords: LGBT;
Representation; Detik.com;
Critical Discourse Analysis.

Kata Kunci: LGBT;
Representasi; Detik.com;
Analisis Wacana Kritis.

Abstract

The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) group is a group that is marginalized due to issues of gender and sexuality. The LGBT community is often stigmatized as immoral and deviant, considered the source of HIV/AIDS, contrary to religion, as a disease, and not by state ideology. Society's knowledge of heteronormative gender and sexuality makes the LGBT group abnormal. The media can construct or deconstruct what people believe to be true. This study intends to explain how the representation of LGBT groups in news coverage in the mass media. In particular, the news in the online media Detik.com. Detik.com was chosen because it is one of the pioneers of internet-based mass media and always occupies Indonesia's top ten most popular websites. This research used Norman Fairclough's critical discourse analysis method, focusing on social structure, class, and social relations. Norman Fairclough presents three dimensions of analysis: text analysis, discourse practice, and sociocultural practice. The study results show Detik.com reporting on LGBT issues dominates in putting LGBT groups in a corner. The LGBT group is still represented as "deviant" and prone to discrimination.

Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan kelompok yang termarginalkan akibat persoalan gender dan seksualitas. Kelompok LGBT sering distigma sebagai kelompok tidak bermoral dan menyimpang, dianggap sumber penyakit HIV/AIDS, bertentangan dengan agama, sebagai suatu penyakit, serta tidak sesuai dengan ideologi negara. Pengetahuan masyarakat mengenai gender dan seksualitas yang heteronormatif menjadikan kelompok LGBT sebagai abnormal. Apa yang diyakini benar oleh masyarakat dapat dikonstruksi maupun didekonstruksi oleh media. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana representasi kelompok LGBT dalam pemberitaan di suatu media massa. Khususnya,

pemberitaan di media online *Detik.com*. Portal berita *Detik.com* dipilih karena merupakan salah satu pelopor media massa yang berbasis internet dan selalu menempati sepuluh besar *website* terpopuler di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yang berfokus pada struktur sosial, kelas, dan relasi sosial. Norman Fairclough menyajikan tiga dimensi analisis, yakni analisis teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Hasil penelitian menunjukkan pemberitaan *Detik.com* mengenai isu LGBT dominan memojokkan kelompok LGBT. Kelompok LGBT masih direpresentasikan sebagai sesuatu yang “menyimpang” dan rentan mengalami diskriminasi.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Pemenuhan hak asasi manusia dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, serta prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi sosial (Yudah, 2013:38). Individu maupun kelompok yang haknya tidak terpenuhi dengan baik menjadikannya masuk dalam golongan kelompok marginal. Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan contoh kelompok yang termarginalkan akibat persoalan gender dan identitas seksual.

Sepanjang tahun 2017, terdapat 973 orang menjadi korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif (Zakiah, 2018:7). Transgender menempati posisi paling banyak mengalami kekerasan, yakni sebanyak 715 kasus. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) (2018) pernah melakukan survei tentang pandangan masyarakat mengenai LGBT (Ahmad, 2018). Survei yang dilakukan dari tahun 2016 hingga 2017 ini memperlihatkan sebanyak 41,1 persen responden menyatakan LGBT tidak punya hak hidup di Indonesia. Dua tahun setelahnya, pada tahun 2019 *Tirto.id* bekerja sama dengan penyedia platform survei daring, Jajak Pendapat (JakPat), melakukan survei dengan topik yang sama. Hasilnya, 55,72 persen responden menjawab sangat setuju jika LGBT salah dan membutuhkan perawatan medis (48,66 persen) (Garnesia, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih cukup konservatif terhadap isu LGBT. Isu mengenai kelompok LGBT sering dianggap sebagai hal yang tabu di Indonesia. Sebagai kelompok yang terpinggirkan akibat permasalahan gender, ia memang dekat dengan bahasan gender. Gender menjadi salah satu konstruksi sosial, menggambarkan bagaimana

identitas seks dan gender minoritas menjadi suatu yang termarginalkan (Yudah, 2013:38). Istilah gender mengacu pada tuntutan, peran, serta posisi seseorang di lingkungannya terkait identitas seksualnya (Papilaya, 2016:29).

Terkait bahasan soal gender tadi, teori *queer* memperlihatkan bagaimana semua gender dan identitas seksual sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang bertujuan untuk menghancurkan anggapan patologis pada identitas minoritas (Hines, 2007:25 dalam Yudah, 2013). Seorang peneliti, Hendri Yulius dalam diskusi berjudul *Queer* yang diadakan oleh Museum MACAN di Jakarta (30/3/2019), mengungkapkan teori *queer* mencoba mengkritisi keberadaan identitas seksual (Wardhani, 2019). Media, biasa menghubungkan terminologi *queer* dengan identitas seksual maupun gender di luar heteroseksual. Meski begitu, menurut Hendri *queer* juga dapat menjadi metode untuk membongkar norma-norma tradisional. Pada dasarnya, teori *queer* memang menganggap bahwa identitas tidaklah stabil atau tetap. Identitas merupakan proses yang dikonstruksi secara terus menerus.

Identitas kelompok LGBT memang masih menjadi kontroversi. Kelompok LGBT sering distigma sebagai kelompok tidak bermoral dan menyimpang, dianggap sumber penyakit HIV/AIDS, bertentangan dengan agama, LGBT sebagai suatu penyakit, serta tidak sesuai dengan ideologi negara. Kelompok LGBT pun dianggap sebagai warga negara kelas dua. Stigma yang didapat oleh kelompok LGBT ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media. Berdasarkan hasil survei, *Alinea* (2018) berkesimpulan bahwa representasi atas identitas transgender sebagai bagian dari kelompok LGBT di media Indonesia masih termarginalkan (Tobing, 2018). Bahkan, mereka sering dianggap sebagai penyakit atau *deviant* yang mengalami penyimpangan. Bingkai dominan yang dilakukan oleh media Indonesia mengenai kelompok LGBT lebih sering digambarkan sebagai kriminalitas dan penyimpangan. Misalnya, media hanya menyorot ketika terjadi razia transgender, di-*ruqyah* karena dianggap kerasukan jin, penggerebekan tempat hiburan gay, atau dihubung-hubungkan dengan bencana alam (Ghiffari, 2019).

Media memiliki peran dalam membentuk opini publik. Adelina, peneliti dari The Interseksi Foundation, menyebut bahwa media sangat *powerful* (Putri, 2014:29). Tak hanya membentuk opini publik, tetapi juga memengaruhi tindakan publik. Pada dasarnya agenda media harus berdasar pada nilai-nilai humanisme yang universal seperti berspektif HAM. Hanya saja, media juga mampu menggiring masyarakat untuk percaya atau tidak percaya terhadap suatu hal. Melalui teks berita,

media bisa menggiring pemahaman yang sudah dikonstruksi oleh media tersebut (Muslich, 2009 dalam Puspitasari, 2020). Sejauh ini, hitam-putihnya suatu hal tak lepas dari konstruksi media. Bahasan soal isu LGBT pun sama, media ikut andil dalam mengkonstruksikannya. Berdasarkan kenyataan itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana representasi LGBT dalam media.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Analisis wacana kritis menurut Fairclough dan Wodak melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan, sebagai bentuk praktik sosial. Fairclough sendiri melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Menurut pandangannya, wacana memiliki tiga efek. Yakni, (1) wacana turut andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek, (2) wacana dapat membantu mengkonstruksi relasi sosial antara orang-orang, (3) wacana berkontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan (Eriyanto, 2005:7). Peneliti juga mengkaji isu LGBT di media dengan pendekatan sosiologis. Misalnya dengan menyertakan teori-teori sosiologis, seperti kajian gender dan kelompok marginal dalam analisisnya. Pada penelitian-penelitian terdahulu, analisis wacana maupun bahasan terkait pemberitaan LGBT di media lebih sering menggunakan pendekatan ilmu komunikasi atau kajian semiotika. Dengan pendekatan sosiologis dalam kajiannya, dan didukung dengan alat analisis yang digunakan, diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan berbeda. Hal ini tentu akan menjadi menarik serta dapat menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Gender, Seksualitas, dan *Queer Theory*

Di masyarakat Indonesia, bahasan mengenai gender dan seksualitas masih tabu untuk dibicarakan. Hal ini timbul akibat dari anggapan bahwa hal-hal yang berbau seks merupakan masalah personal yang tidak perlu dibicarakan di muka umum. Dengan adanya anggapan seperti tabu ataupun 'saru' ini kemudian membatasi dalam melihat sejauh mana ketimpangan yang terjadi. Gender yang masih sukar dibicarakan di dalam masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu hal yang dapat dipertukarkan dan berubah sewaktu-waktu, pun diartikan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata gender sebenarnya berasal dari bahasa Inggris (Fakih, 1997:7). Jika dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep soal gender ini belum bisa menjelaskan secara jelas mengapa konsep tersebut penting untuk memahami sistem ketidakadilan sosial.

Perbedaan gender datang melalui proses yang sangat panjang. Seperti yang disebutkan oleh Mansour Fakih, bahwa perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, hingga dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat menyebabkan kaburnya arti gender yang sebenarnya. Bahkan kemudian memengaruhi biologis dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Ia mencontohkan bagaimana konstruksi gender mampu membuat perempuan seolah-olah dikodratkan bersifat lemah lembut, atau harus memiliki sifat feminim lain. Begitupun laki-laki yang dikodratkan memiliki tubuh yang kuat dan bersifat agresif, atau sifat maskulin lain. Hal ini disosialisasikan dan direkonstruksikan terus menerus sejak mereka dilahirkan. Sehingga, apakah sifat-sifat tadi memang kodrat yang diberikan Tuhan atau justru bentukan dan konstruksi dari masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terjawab (Fakih, 1997:9-11).

Konstruksi sosial yang tercipta menghasilkan pandangan: mana yang dianggap normal dan mana yang dianggap tidak normal. Misalnya, konstruksi dalam masyarakat yang hanya mengenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, membuat gender lain di luar itu sebagai sesuatu yang tidak normal. Padahal, seksualitas adalah identitas, yakni soal siapa kita dan ingin menjadi seperti apa kita (Hidayana, 2004:4).

Sebagai produk diskursif, seksualitas dan gender hampir tidak bisa dipisahkan (Wijaya, 2015:333). Dalam esainya, Suryakusuma membagi studi seksualitas dalam dua pendekatan, yakni pendekatan esensialis dan non-esensialis. Dalam pendekatan esensialis, seksualitas manusia digambarkan sebagai suatu hal yang bersifat ahistoris dan tidak bisa berubah. Pendekatan ini biasa digunakan oleh ilmu kedokteran, psikiatri, hingga psikologi. Sedangkan dalam pendekatan non-esensialis lebih menekankan bahwa seksualitas tak bisa lepas dari konstruksi sosial yang kompleks (Wijaya, 2015:329). Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pada setiap zaman kebenaran soal seks selalu diartikan berbeda. Maka, tidak ada realitas yang terlepas tanpa adanya nilai sosial.

Anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai seksualitas laki-laki dan perempuan tak lepas dari konsepsi budaya tentang maskulinitas dan feminitas, termasuk dalam hal memilih pasangan seksual dan bentuk relasi yang terbangun (Noor, 2004:66). Dalam kehidupan seksualitas, masyarakat menciptakan apa yang disebut dengan nilai dan norma yang kemudian mengkonstruksikannya guna menentukan kehidupan mereka. Seksualitas sendiri merupakan sebuah

konstruksi sosial, karena seksualitas adalah konsep tentang nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan begitu, terdapat hubungan antara struktur sosial dengan bagaimana dan bilamana seks dilakukan dan dengan siapa seks diperbolehkan secara sosial (Noor, 2004:65-66).

Dari sini, penerimaan masyarakat mengenai seksualitas masih berpatok pada hal yang dianggap 'normal', yakni mereka yang heteroseksual. Orang atau kelompok yang berada di luar kelompok heteroseksual dianggap sebagai penyimpangan. Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai bagian dari kelompok yang berbeda menjadi tersisihkan di masyarakat. Karena masyarakat percaya, bahwa nilai, norma, orientasi, hingga perilaku yang dipercayainya saat ini sudah benar dan yang paling tepat. Dan menurut masyarakat kelompok LGBT sudah melenceng dan menyimpang dari nilai-norma tersebut.

Membicarakan seksualitas tak akan lengkap tanpa menyinggung teori *queer*. Istilah *queer* dipakai untuk menyebut kelompok seksual dan gender minoritas yang menolak konstruksi identitas gender tradisional, baik itu heteroseksualitas maupun homoseksualitas (Raviola, 2014:65). *Queer* lahir atas penolakan eksklusivitas atas identitas seksual yang beragam. Teori *queer* berakar dari anggapan bahwa identitas tidaklah baku dan stabil, sehingga tidak bisa menentukan diri seseorang (Wulandari, 2019:3). Teori ini juga mempertanyakan adanya identifikasi gender dengan menyatakan bahwa tidak hanya gender (maskulin dan feminim) tetapi juga jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) merupakan hasil konstruksi sosial. Butler menyebut identitas dapat berubah, pasalnya dipengaruhi oleh sosialnya dan terjadi berulang-ulang (Wulandari, 2019:3). Bangunan dasar dari teori ini yakni anti-normativitas, yakni terus mempertanyakan norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Mengingat bagaimana teori ini termasuk suatu pendekatan anti-normativitas, ia bersifat non-identitarian. Dalam pendekatan kritis, teori *queer* mampu memperlihatkan bagaimana suatu hal dijadikan sebagai norma (Wardhani, 2019).

Media dan Representasi: Langgengnya Stigma Buruk terhadap Kelompok LGBT

Media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Berbobot tidaknya suatu informasi sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi media yang menyampaikannya. Karena bagaimana suatu media memberitakan isu tertentu memperlihatkan bagaimana ideologi media tersebut. Seringkali, media hanya

menjadi alat bagi sebagian besar kelompok tanpa memedulikan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ini yang kemudian menjadi masalah. Belum lagi kepemilikan media yang berlandaskan profit, media hanya dijadikan ladang uang bagi para pemilik modal. Dengan begitu, media yang seharusnya menyuarakan orang atau kelompok minoritas terpinggirkan malah memilih mengejar keuntungan semata.

Pada teks pemberitaan oleh media, wacana yang hadir ditujukan merepresentasikan realitas kepada khalayak. Yang biasanya menjadi persoalan adalah bagaimana realitas atau objek tersebut ditampilkan. Apakah media telah menampilkan segala sisi dari realitas yang ada atau justru bias pada sisi buruknya saja dan cenderung memarjinalkan seseorang atau kelompok tertentu. Karena pada dasarnya representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, suatu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Kata representasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, *repraesentare*, yang berarti “to make present or manifest or to present again” (Nabila & Surwati, n.d.). Kode-kode dalam representasi dikaitkan dalam koherensi sosial seperti kelas sosial dan kepercayaan dominan yang berkembang di masyarakat. Seperti patriarki, materialisme, kapitalisme, dan sebagainya (Eriyanto, 2005:113-114). Hal inilah yang berpengaruh pada pemberitaan media dan bagaimana media merepresentasikan realitas di masyarakat.

Pada kasus pemberitaan mengenai kelompok Lesbian Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), ideologi media sangat berpengaruh dalam merepresentasikan atau menggambarkan kelompok LGBT di tengah-tengah masyarakat yang cenderung konservatif. Penelitian yang dilakukan *United Nations Development Programme* menyebutkan terdapat tiga kategori pemberitaan isu LGBT oleh media. Ketiga kategori itu yakni, pemberitaan secara seimbang, pemberitaan sensasional yang menimbulkan stigma tertentu, serta media yang terafiliasi dengan Islam garis keras yang konservatif dan fundamentalis (Christina, 2019). Dari ketiga kategori pemberitaan mengenai isu LGBT, tak menutup kemungkinan semuanya terjadi pada pemberitaan-pemberitaan media di Indonesia.

Media, bukanlah saluran yang bebas. Ia merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan keberpihakannya (Eriyanto, 2005:36). Dengan begitu, apa yang dipercayai masyarakat dikonstruksi oleh media melalui pemberitaannya. Belum lagi, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat segala informasi tersebar secara luas dan cepat. Sehingga apa pun yang nantinya disampaikan oleh media akan diterima khalayak luas, yang kemudian

mereka yakni benar. Jika kemudian bias dan hanya menguntungkan salah satu pihak, kelompok dominan saja misalnya, informasi-informasi yang beredar justru dapat menimbulkan masalah baru.

Pemberitaan Kelompok LGBT di Detik.com

Hasil pencarian pada kategori *detiknews* dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari hingga Desember 2020, menghasilkan 179 berita dengan berbagai isu yang melibatkan kelompok LGBT. Dalam kerangka penelitian ini, berita yang terkumpul diseleksi dengan cara kurasi. Proses kurasi dilakukan dengan cara mengurangi perhitungan terhadap berita-berita LGBT di luar negeri, berita yang tidak spesifik membahas isu LGBT, dan berita video yang juga muncul di kolom pencarian tersebut. Hasilnya, terdapat 96 berita yang dikelompokkan dalam tiga kategori, memojokkan, netral, dan berpihak. Berikut merupakan tabel data berita berdasarkan kategori memojokkan, netral, dan berpihak:

Tabel 1.
Jumlah Berita Isu LGBT di *Detik.com*

Kategori Berita			Jumlah
Memojokkan	Netral	Berpihak	
80	11	5	96

Sumber: Data primer diolah

Untuk melihat bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan dalam pemberitaan di *Detik.com*, peneliti mengelompokkannya berdasarkan dua bentuk representasi. Dua bentuk representasi tersebut yakni: fisik dan verbal. Representasi secara fisik dapat dilihat dari berita yang merepresentasikan kelompok LGBT melalui penampilan seperti pakaian dan gerak-geriknya ataupun dari aktivitas yang dilakukannya. Sedangkan representasi secara verbal dapat dilihat dari bagaimana berita merepresentasikan ucapan kelompok LGBT maupun ucapan masyarakat menyangkut kelompok LGBT. Berdasarkan 96 berita mengenai isu LGBT di *Detik.com* yang sudah dikurasi dan dikategorikan, kelompok LGBT direpresentasikan secara fisik dalam 77 pemberitaan dan direpresentasikan secara verbal dalam 19 pemberitaan. Rincian data jumlah berdasarkan kategori berita dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Data Jumlah Pemberitaan

Memojokkan		Netral		Berpihak		Jumlah
Fisik	Verbal	Fisik	Verbal	Fisik	Verbal	
67	13	6	5	4	1	96

Sumber: Data primer diolah

Berita-berita yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknis analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Fairclough melihat analisis wacana kritis harus memerhatikan tiga (3) dimensinya, yakni analisis teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* (Haryatmoko, 2019:23). Dalam melakukan analisis kritis, Fairclough memberi empat (4) langkah analisis. Pertama, memfokuskan pada ketidakberesan sosial dalam aspek semiotiknya. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan tersebut. Ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut. Terakhir, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin mengatasi hambatan-hambatan. Keempat tahap ini mesti selalu memperhitungkan tiga dimensi yang sebelumnya sudah dijelaskan (Haryatmoko, 2019:35).

Berdasarkan kategori berita yang sudah dipaparkan di atas, berikut ini merupakan analisis teks berita yang membahas isu LGBT di *Detik.com*. Analisis pertama akan mengurai berita yang bersifat memojokkan. Kemudian dilanjutkan analisis terhadap berita yang masuk kategori netral. Setelah itu, akan diurai tentang berita yang memihak kelompok LGBT.

1. Berita Memojokkan

Dalam analisis, tidak semua berita dimasukan. Berita yang dianalisis adalah berita yang dinilai sangat menonjol menampilkan kategori fisik dan verbal. Berikut ini analisis berita yang bersifat memojokkan.

a) Representasi Secara Fisik

Berita yang merepresentasikan kelompok LGBT secara fisik dapat dilihat dari berita “Pecat Tentara Gay, TNI Tegaskan Tak Akan Terima LGBT Jadi Prajurit” (30/10/2020). Dalam berita tersebut, kelompok LGBT direpresentasikan berdasarkan aktivitasnya. Berikut ini analisis atas berita tersebut:

Beberapa istilah dalam teks berita seperti “tentara gay” (judul) dan “calon yang terlibat LGBT” (paragraf 2) menunjukkan bahwa kelompok LGBT adalah kelompok yang berbeda dengan masyarakat lain. Penggunaan embel-embel gay maupun LGBT sebagai predikat memperjelas kemungkinan tersebut. Adanya istilah seperti “TNI tegaskan tak akan terima LGBT” (judul) ingin memperlihatkan bahwa TNI dengan tegas dan mutlak tidak menerima keberadaan kelompok LGBT sebagai bagian dari mereka. Selain itu, istilah “kesehatan kejiwaan” (paragraf 6) dalam teks berita menunjukkan bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan sebagai kelompok yang memiliki masalah kejiwaan.

Metafora yang terdapat dalam teks berita adalah kata “oknum” (paragraf 10 dan paragraf 11). KBBI (2001) mengartikan oknum dengan tiga pengertian: (1) penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik; (2) orang seorang, perseorangan; (3) orang atau anasir, dalam pemaknaan yang kurang baik. Seno Gumira A menyebut bahwa kata oknum memuncak pemakaiannya di masa Orde Baru (Orba). Biasanya, kata oknum digunakan untuk mengalihkan sebuah permasalahan sistemik menjadi permasalahan personal. Di masa Orba, kata tersebut sering digunakan untuk menggambarkan permasalahan di tubuh Polri dan ABRI (TNI), yakni dengan memberi penekanan bahwa permasalahan yang terjadi bukan soal instansi, melainkan perseorangan (VOI, 2021).

Dalam berita di atas, struktur teks dan perbendaharaan kata yang dipakai cenderung menguntungkan pihak TNI. Keberpihakan ada pada sudut pandang TNI sebagai pemilik kekuasaan yang menentang adanya LGBT menjadi anggotanya. Dengan begitu, adanya larangan kelompok LGBT untuk menjadi anggota TNI merupakan ketidakberesan sosial yang termuat dalam berita tersebut. Dalam urusan publik seperti di dunia pekerjaan, yang mestinya diperhatikan bukanlah apa orientasi seksual seseorang, namun bagaimana kompetensi yang ia punya. Apakah memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota TNI atau tidak. Mencampur urusan privat dengan urusan publik justru dapat mencederai kebebasan atas hak individu.

Pada teks berita, istilah kesehatan kejiwaan menjadi salah satu alasan mengapa kelompok LGBT dilarang menjadi anggota TNI. Padahal, anggapan yang menyatakan jika kelompok LGBT itu suatu penyakit dan penyimpangan adalah keliru. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychiatric Association (APA) terhadap orientasi seksual homo memperoleh kesimpulan bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukanlah penyimpangan psikologis, bukan merupakan

penyakit, dan bukan abnormal. Berdasarkan penelitian itu, istilah homo dicabut dari daftar penyakit jiwa. Ketetapan mengenai temuan APA tersebut diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan Departemen Kesehatan RI (Sa'dan, 2015:361). Artinya, anggapan bahwa kelompok LGBT merupakan bentuk penyimpangan, abnormal, dan suatu penyakit sudah harus disingkirkan. Hal itu dikarenakan, baik secara internasional maupun nasional, kelompok LGBT sudah diakui memiliki hak asasi yang melekat pada mereka.

Argumentasi soal pelarangan terhadap kelompok LGBT semakin diperkuat dengan tidak adanya argumen tandingan soal hal tersebut. Hal itu semakin memarginalkan kelompok LGBT. Dalam berita tersebut, tidak ada sama sekali pernyataan yang berasal dari pihak kelompok LGBT. TNI memang pihak yang terkait langsung pada persoalan yang sedang dibicarakan. Meski begitu, TNI juga merupakan salah satu kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di masyarakat. Baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui pemberitaannya media mampu melegitimasi *status quo*. Apa yang terjadi kemudian, media ikut mendukung opini para pemilik kepentingan dan meneruskan opini itu melalui media mereka sehingga memengaruhi opini publik. Hal itu dikarenakan apa yang menjadi opini media akan menjadi opini publik atau khalayak (Tamburaka, 2012:89).

Apa yang dilakukan oleh pihak TNI sebenarnya bentuk pelestarian terhadap nilai-nilai patriarki. Gayle Rubin menjelaskan bahwa rangkaian aturan di masyarakat secara tidak langsung menstransformasikan seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Pada masyarakat patriarkal, fakta fisiologi laki-laki dan perempuan digunakan untuk membentuk identitas dan perilaku maskulin dan feminim dibuat seperti budaya yang alamiah (Agustine et al., 2015:290). Laki-laki diharuskan untuk menjadi gagah, kuat, dan menyukai lawan jenis yakni perempuan. Jika kemudian seorang laki-laki tidak gagah, tidak kuat, dan tidak menyukai perempuan, ia akan dianggap gagal sebagai laki-laki. Hal ini tampak diadopsi oleh aparat negara seperti TNI.

Jika dilihat dari argumen yang disajikan, seakan tidak ada pilihan lain dalam mengatasi hambatan atas ketidakberesan yang terjadi. Hanya ada satu pilihan, yakni mengikuti peraturan yang ada. Meski begitu, bukan tidak mungkin untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok marginal seperti kelompok LGBT. Menyadari bahwa semua orang berhak untuk hidup dan melakukan apa yang mereka suka tanpa merasa takut dan dikucilkan. Dengan begitu diharapkan semua pihak akan merasa terlindungi dan diuntungkan.

b) Representasi Secara Verbal

Setelah melihat bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan secara fisik, di bawah ini merupakan contoh berita bersifat memojokan yang merepresentasikan kelompok LGBT secara verbal. Pada berita berjudul “Demo Tolak LGBT di Kantor Walkot, Massa: Jangan Sampai Depok Turun Azab!” (31/01/2020), kelompok LGBT direpresentasikan secara verbal oleh massa aksi sebagai penyebab azab. Berikut ini analisis atas berita:

Beberapa istilah dalam teks berita seperti “LGBT adalah sebuah azab” (*lead*) dan “menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman” (paragraf 5) ingin menggambarkan bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan dan dihubungkan dengan agama tertentu. Yakni Islam sebagai agama dominan di Indonesia. Adanya istilah “demo tolak LGBT” (judul) turut memperlihatkan bahwa keberadaan kelompok LGBT dilarang ada di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Selain itu, istilah “LGBT adalah sebuah penyakit dan penyimpangan sosial” pada paragraf 3 memberi kesan bahwa kelompok LGBT telah menyimpang dari yang ‘seharusnya’. LGBT dianggap sebagai penyakit yang mestinya bisa disembuhkan dan dihindari.

Metafora yang terdapat dalam teks berita seperti “menenggelamkan (kaum Sodom)” dan “menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman” seakan ingin mempertegas suatu keyakinan bahwa LGBT dilarang oleh agama (Islam khususnya) dan dapat menimbulkan malapetaka. Hal tersebut tentu dapat menjadi sumber retorika agar pembaca teks berita tersebut mempercayai dan mengamininya. Percaya bahwa “benar” jika kelompok LGBT dapat mendatangkan azab.

Dalam teks berita di atas, terdapat struktur teks dan perbendaharaan kata yang cenderung memojokkan kelompok LGBT. Keberpihakan yang ditunjukkan dalam berita tersebut mengarah pada sudut pandang pendemo atau penolakan terhadap keberadaan kelompok LGBT. Di sini, kelompok LGBT seperti tidak memiliki daya atau tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan keresahannya. Dalam teks itu, lagi-lagi tidak ada sama sekali pernyataan dari pihak kelompok LGBT.

Berdasarkan analisis berita di atas, terlihat bahwa keberadaan kelompok LGBT sudah sering mengalami penolakan. Penolakan tersebut bermula dari pemahaman masyarakat terhadap gender dan seksualitas serta nilai-norma yang diajarkan sejak lama. Identitas gender dan seksualitas masih menjadi hal yang tabu dan eksklusif hanya untuk kelompok dominan saja. Apa yang disebut dengan ‘normal’ soal seksualitas dihegemoni oleh kelompok heteroseksual sebagai kelompok dominan di masyarakat. Identitas gender di luar konstruksi biner heteronormatif dan konsep

gender yang ada di masyarakat dianggap sebagai kesalahan, menyimpang, dan abnormal.

Sebagai negara heteronormatif, konsep normalitas seksual di Indonesia didasarkan pada pernikahan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini memperkuat dikotomi nilai-nilai dan norma-norma maskulin dan feminin (Andajani et al., 2015:315). Bukan tidak mungkin jika kemudian terjadi stereotip tertentu, stigma negatif, hingga berujung timbul diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT selaku kelompok minoritas seksual.

Banyak faktor yang memengaruhi bagaimana pemaknaan masyarakat Indonesia terhadap seksualitas dan identitas gender. Beberapa faktor pengaruh itu merentang dari segi agama, norma-nilai, dan moralitas yang sudah mengakar kuat dalam diri masyarakat sangat berpengaruh dalam memaknai seksualitas. Sebagai agama yang dominan di Indonesia, dogma Islam cukup terasa jika menyangkut soal kelompok LGBT. Dalam dogma itu biasanya dihubungkan dengan cerita kaum Sodom di zaman nabi dan rosul yang kemudian mendapat azab dari Tuhan karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Agama dijadikan alasan menolak keberadaan kelompok LGBT. Masthuriyah Sa'dan menulis hal yang menarik soal hubungan agama dan seksualitas. Dalam artikel jurnal itu disebutkan, alih-alih untuk kepentingan membumikan 'hukum Tuhan, hukum Tuhan justru menjadi penghalang antarmanusia yang memiliki orientasi seksual berbeda. Agama yang seharusnya menjadi sumber rujukan umatnya untuk menuju keselamatan malah terkesan menjadi jurang pemisah antara Tuhan dan umat-Nya sendiri (Sa'dan, 2015:365).

Berdasarkan analisis, terlihat bahwa berita di atas berupaya mempertahankan tatanan yang sudah ada. Tatanan yang sudah ada, seperti misalnya agama, mau tidak mau harus menolak keberadaan kelompok LGBT agar tetap menjadi "pegangan" dan dipercayai oleh masyarakat. Sedangkan suara dari kelompok LGBT atas nasib mereka tidak didengar sama sekali. Suara mereka tidak turut diungkap dalam teks berita tersebut. Hal itu terlihat dari beberapa hal yang termuat dalam berita itu. Selain terlihat dari struktur argumentasinya, ke-tidak-berpihakan *Detik.com* terlihat dari absennya suara kelompok LGBT.

2. Berita Netral

Isi berita dalam kategori netral biasanya menganut prinsip *cover both side*. Dalam dunia jurnalistik, *cover both side* ditujukan untuk memberi kesempatan dan

ruang yang sama bagi para narasumber untuk mengemukakan pendapat mereka. Dengan begitu, pembaca tidak dipaksa untuk menerima versi informasi tunggal dari salah satu narasumber (Hakim, 2021:115). Selain bertujuan menyampaikan informasi, pemberitaan di media juga ditujukan untuk memberi edukasi dan pencerahan. Dalam analisis, tidak semua berita dimasukan. Berita yang dianalisis adalah berita yang dinilai sangat menonjol menampilkan kategori fisik dan verbal. Berikut ini analisis berita yang bersifat netral.

a) Representasi Secara Fisik

Berita yang merepresentasikan kelompok LGBT secara fisik dapat dilihat dari berita “Dikritik Komnas HAM, Ini Imbauan Wali Kota Depok soal Razia LGBT” (13/01/2020). Dalam berita tersebut, kelompok LGBT direpresentasikan berdasarkan aktivitasnya. Berikut ini analisis atas berita:

Terdapat beberapa istilah dan metafora dalam teks berita yang menggambarkan berita netral. Beberapa istilah seperti “kasus kekerasan seksual sesama jenis” dan “kasus seperti Reynhard” (paragraf 2) ingin memperlihatkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Reynhard (kekerasan seksual) mewakili aktivitas kelompok LGBT pada umumnya. Dalam teks berita, seksualitas Reynhard yang homoseksual diikutsertakan dan dikaitkan dengan kekerasan seksual yang dilakukannya. Adanya istilah lain seperti “*crisis center* untuk korban LGBT” (*lead*) ingin menunjukkan bahwa kelompok LGBT dilihat sebagai sesuatu yang perlu diatasi karena menjadi pelaku yang menimbulkan korban.

Beberapa istilah yang memojokkan kelompok LGBT tadi dinetralkan dengan adanya istilah dan metafora yang juga berpihak pada kelompok LGBT. Misalnya “bertentangan dengan dasar negara” (paragraf 12) yang menggambarkan apa yang terjadi oleh kelompok LGBT merupakan bentuk ketidakadilan. Dalam teks berita, *Detik.com* berusaha netral dengan menyertakan dua argumen yang berbeda. Meski pernyataan Komnas HAM tak terlalu panjang, setidaknya suara kelompok LGBT sudah ditampilkan dalam teks berita tersebut.

Imbauan Wali Kota Depok terkait razia aktivitas LGBT dan didirikannya *crisis center* untuk korban LGBT menjadi ketidakberesan sosial yang disajikan dalam teks berita. Hal itu lantas dikritik oleh Komnas HAM sebagai tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan dasar negara. Argumen Komnas HAM merujuk pada realitas yang terjadi di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa kelompok LGBT menyimpang dan tidak “normal”, anggapan tersebut berasal dari nilai dan moralitas

yang sejak kecil diajarkan. Bahwa ekspresi gender yang benar adalah yang sesuai dengan jenis kelaminnya, bahwa yang disebut normal ialah jika menyukai lawan jenis dan bukan sebaliknya. Stigma yang berkembang terkait kelompok LGBT yang menyimpang, suatu penyakit, sumber HIV, hingga tidak sesuai dengan ideologi negara turut andil menjadi hambatan atas ketidakberesan sosial tersebut.

Dilihat dari teks berita tersebut, setidaknya terdapat satu upaya yang perlu dilakukan. Yakni dengan mendekonstruksi pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman gender dan seksualitas. Adanya pendidikan dan bahan bacaan yang mendukung keberagaman dan lingkungan yang inklusif diharapkan dapat mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap kelompok LGBT. Misalnya, dengan mengajarkan pengetahuan tentang gender dan seksualitas yang beragam sedari dini. Karena, pada realitasnya kelompok LGBT itu ada dan berhak hidup selayaknya masyarakat lain.

b) Representasi Secara Verbal

Setelah melihat bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan secara fisik, di bawah ini merupakan contoh berita bersifat netral yang merepresentasikan kelompok LGBT secara verbal. Pada berita berjudul “Unilever Indonesia Jawab Anggapan Dukung LGBT: Kami Menghormati Budaya RI” (25/06/2020), kelompok LGBT direpresentasikan secara verbal dalam pernyataan Unilever. Berita tersebut dipilih karena menonjol. Kasus Unilever ini ramai diperbincangkan namun hanya terdapat satu pemberitaan di *Detik.com*. Berikut ini analisis atas berita:

Terdapat beberapa istilah dalam teks berita yang menggambarkan berita netral. Beberapa istilah seperti “Unilever dianggap mendukung LGBT” (*lead*), “seruan boikot produk Unilever menyeruak” (*lead*), dan “menyerang akun Instagram Unilever” (paragraf 6) menggambarkan situasi negatif antara Unilever dengan isu LGBT, sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Unilever menjadi relevan untuk dilakukan. Selain itu, beberapa istilah tersebut terlihat ingin menunjukkan keganasan dari *netizen* atau masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dianggap memojokkan pihak Unilever karena dianggap mendukung kelompok LGBT.

Dalam teks berita, terdapat pula istilah “Unilever percaya pada keberagaman dan lingkungan yang inklusif” yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa Unilever mengakui adanya keberagaman gender dan seksualitas. Artinya, sebagai kelompok dengan permasalahan gender dan seksualitas yang dianggap berbeda, keberadaan kelompok LGBT diakui. *Detik.com* mencoba netral dengan menggambarkan

situasi yang ada namun juga berpihak pada Unilever. Keberpihakan yang ditujukan menjadikan *Detik.com* seperti mulut Unilever untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada.

Anggapan soal Unilever mendukung keberadaan kelompok LGBT menjadi ketidakberesan sosial yang disorot. Unilever sebagai perusahaan yang produk-produknya sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dirasa membela kelompok LGBT yang keberadaannya sejak awal sudah menjadi perdebatan di Indonesia. Ini tentu akan berpengaruh terhadap penjualan produk-produknya di pasaran. Ikut terpengaruhnya penjualan produk mereka bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang ingin terus memiliki, mengejar keuntungan, dan mendapat uang yang sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya, tindakan ekonomi kapitalistik didasari oleh harapan terhadap keuntungan dengan memanfaatkan segala kesempatan untuk melakukan transaksi (Andreski, 1989:20). Jika proses tersebut menjadi terhambat dikarenakan adanya anggapan Unilever mendukung LGBT, maka pihak Unilever akan mendapatkan kerugian.

Di masyarakat, kelompok LGBT sering dipersepsikan sebagai produk “Barat” yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Pemahaman tersebut seolah lupa pada fakta soal keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia. Di suku Bugis misalnya, dikenal dengan lima gender yang berbeda. Yakni: *aroane* atau laki-laki; *makkunrai* atau perempuan; *bissu*, mewakili aspek perempuan dan laki-laki yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji; *calabai*, mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan; dan *calalai*, mewakili aspek terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki (Candraningrum, 2015). Adanya keberagaman gender di Indonesia ini menandakan bahwa pemahaman soal LGBT merupakan budaya khas “Barat” boleh jadi keliru.

Adanya keberagaman tersebut seharusnya sudah mampu mengatasi ketidakberesan sosial yang ada. Pernyataan Unilever soal lingkungan yang inklusif mesti diterapkan agar keberagaman di Indonesia tak terkikis secara perlahan. Termasuk keberagaman gender dan seksualitas yang juga memiliki hak untuk hidup dan mendapat rasa aman.

3. Berita Berpihak

Dalam analisis, tidak semua berita dimasukkan. Berita yang dianalisis adalah berita yang dinilai sangat menonjol menampilkan kategori fisik dan verbal. Berikut ini analisis berita yang bersifat berpihak.

a) Representasi Secara Fisik

Berita yang merepresentasikan kelompok LGBT secara fisik dapat dilihat dari berita “Ada Massa LGBT di Aksi Hari Perempuan Sedunia di Depan Istana” (08/03/2020). Dalam berita tersebut, kelompok LGBT direpresentasikan berdasarkan aktivitas dan atribut yang dipakai. Berikut ini analisis atas berita:

Terdapat beberapa istilah dan metafora dalam teks berita yang menggambarkan keberpihakan pada kelompok LGBT. Istilah seperti “Massa meminta negara mengakui keberagaman”, “meminta negara menghentikan ‘kriminalisasi’ terhadap kelompok LGBT” (paragraf 4), dan “perwakilan massa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)” (*lead*) ingin memperlihatkan situasi yang dihadapi oleh kelompok LGBT. Hal tersebut merupakan suara kelompok LGBT dalam menuntut pengakuan atas keberagaman dan rasa aman dalam kehidupan sosialnya. Keterlibatan kelompok LGBT dalam teks berita direpresentasikan dalam aktivitas yang positif, yakni menuntut hak dengan cara yang demokratis.

Penggunaan metafora “menggelar aksi” pada teks berita berguna untuk meyakinkan pembaca bahwa kelompok LGBT tak selalu melakukan kegiatan yang dianggap negatif dan meresahkan. Kelompok LGBT juga dapat melakukan kegiatan yang positif. Sehingga mereka direpresentasikan dengan baik dalam pemberitaan. Selain itu, perbendaharaan kata yang dipakai cenderung memberi gambaran yang menguntungkan untuk kelompok LGBT. Semua deskripsi di dalamnya menyangkut soal nasib mereka yang masih diabaikan oleh negara. Sehingga terlihat jelas bahwa keberpihakan ada untuk massa aksi dan kelompok LGBT. *Detik.com* menjadi media yang menyampaikan suara mereka.

Dengan adanya penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa ketidakberesan sosial yang terjadi adalah nasib kelompok LGBT yang masih diabaikan oleh negara. Sebagai negara yang mengaku peduli dengan isu HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merealisasikannya. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sudah dengan tegas menyebut bahwa pemenuhan atas hak asasi warga negara merupakan yang utama. Adanya badan independen yang berfokus pada permasalahan HAM dan sudah ditandatangani beberapa konvensi internasional oleh Indonesia seharusnya membuka peluang bagi keberagaman (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Khususnya bagi keberagaman gender dan seksualitas. Namun, pada praktiknya negara masih abai atas hak kelompok minoritas seperti kelompok LGBT. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan negara atas isu HAM.

Dalam berita di atas, kelompok LGBT direpresentasikan sebagai kelompok minoritas terpinggirkan yang menuntut haknya secara demokratis. Ini merupakan sudut pandang yang positif. Penggambaran kelompok LGBT di media yang biasanya bersifat sensasional dan tak sedikit memojokkan. Biasanya, kelompok LGBT direpresentasikan sebagai “penyakit”, “menyimpang”, “abnormal”, dan stigma lain yang terus direproduksi melalui pemberitaan di media. Maka tak heran jika kemudian liputan yang negatif tersebut semakin memperkuat ketegangan terkait isu LGBT di ruang publik dan pribadi (Human Rights Watch, 2016:37). Dalam berita di atas, kelompok LGBT tak lagi digambarkan demikian. Mereka direpresentasikan sebagai warga negara yang berusaha menuntut keadilan atas haknya dengan cara yang positif.

Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi kelompok LGBT. Suara mereka dalam menuntut keadilan yang timbul tenggelam mulai muncul ke permukaan. Hartono, salah satu aktivis LGBT, menyampaikan perlunya merangkul media *mainstream* yang tertarik memberitakan isu LGBT. Ia juga menyebut bahwa tak selalu media *mainstream* memberitakan LGBT buruk (Melati, 2015). Dalam teks berita di atas, *Detik.com* sebagai salah satu media *mainstream* berusaha membuka peluang bagi kelompok LGBT untuk bersuara. Dengan kata lain, pemberitaan tersebut berorientasi pada kepentingan kelompok LGBT.

b) Representasi Secara Verbal

Setelah melihat bagaimana kelompok LGBT direpresentasikan secara fisik, di bawah ini merupakan contoh berita bersifat memihak yang merepresentasikan kelompok LGBT secara verbal. Pada berita berjudul “Komnas HAM Minta Wali Kota Depok Batalkan Imbauan Razia LGBT” (13/01/2020), kelompok LGBT direpresentasikan secara verbal dalam pernyataan Komnas HAM. Berikut ini analisis atas berita tersebut:

Terdapat beberapa istilah dalam teks berita yang menggambarkan keberpihakan pada kelompok LGBT. Adanya istilah seperti “tindakan diskriminatif” (*lead*), “perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender” (paragraf 2), “setiap orang berhak atas perlindungan”, dan “berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan” (paragraf 3) menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif bertentangan dengan hak asasi manusia yang sudah melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Di sini kelompok LGBT digambarkan sebagai kelompok minoritas yang seharusnya mendapat perlindungan atas hak-

haknya. Disebutkannya istilah “bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental” (paragraf 9) merepresentasikan kelompok LGBT secara berbeda. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kelompok LGBT terbukti bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental seperti yang biasa dilekatkan pada diri mereka.

Selain itu, metafora “mencederai kovenan internasional” yang tersaji dalam teks berita merepresentasikan nasib kelompok LGBT yang haknya terabaikan. Apa yang dialami oleh kelompok LGBT berbanding terbalik dengan kovenan internasional yang sudah ditandatangani oleh Indonesia. Perbendaharaan kata yang dipakai juga memberi gambaran yang menguntungkan untuk kelompok LGBT, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar mereka.

Dalam berita, argumen yang menyinggung imbauan Wali Kota Depok lebih sedikit (Wali Kota Depok disebut 3 kali) daripada pernyataan Komnas HAM (Komnas HAM disebut 8 kali). Ini menunjukkan dukungan atau keberpihakan atas hak kelompok LGBT. Suara kelompok LGBT direpresentasikan melalui pendapat Komnas HAM yang tersaji dalam teks berita di atas.

Membicarakan kelompok minoritas seperti kelompok LGBT tak bisa lepas dari bahasan soal HAM. Karena hak seksual maupun ekspresi gender seseorang merupakan bagian integral dari HAM. Dalam *International Conference Population and Development* (ICPD) tahun 199, prinsip-prinsip hak seksual sudah diperinci. Yakni: 1). Hak atas kenikmatan seksual tanpa kekhawatiran akan infeksi penyakit, kerusakan tubuh atau kehamilan yang tak diinginkan; 2). Hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal maupun sosialnya; 3). Hak atas perawatan, pendidikan, informasi, dan pelayanan kesehatan seksualitas; 4). Hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih bagaimana, kapan, dan dengan siapa untuk aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh; 5). Hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa tanpa adanya pemaksaan; 6). Hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduktif dan seksual; 7). Hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi (Muthmainnah, 2015:340).

Pada dasarnya, apa yang disampaikan oleh Komnas HAM merupakan bentuk keterwakilan dari kelompok LGBT. Adanya keterwakilan atas suara kelompok LGBT yang diperlihatkan dalam teks berita di atas merupakan salah satu tujuan dari praktik jurnalisme. Sebagai bagian dari jurnalisme, media massa juga

berperan untuk mencapai tujuan yang berorientasi kepada masyarakat. Apa yang diperlihatkan pada teks berita di atas termasuk tujuan dari keberadaan jurnalisme. Yakni berupa *voice to the voiceless* atau menyuarakan kepentingan dari mereka yang tidak memiliki suara (Ishwara, 2005:9). Karena membicarakan LGBT berarti membicarakan hak seseorang atau kelompok yang sering diabaikan. Suara mereka dianggap tidak penting, sehingga tak sedikit media yang mengabaikan sudut pandang dari kelompok minoritas tersebut.

Catatan Kritis Representasi Kelompok LGBT dalam Pemberitaan Media *Online Detik.com*

Berdasarkan analisis berita di atas, ditemukan beberapa bentuk representasi terhadap kelompok LGBT dalam pemberitaan *Detik.com*. Kelompok LGBT direpresentasikan: (1) berbeda dengan masyarakat lain; (2) sebagai pelaku yang melanggar asusila atau menyimpang; (3) sebagai suatu penyakit dan penyimpangan seksual; (4) sebagai penyebab datangnya azab, keberadaannya terlarang; (5) sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual; dan (6) tidak sesuai dengan budaya mayoritas, abnormal. Meski dalam pemberitaan *Detik.com* kelompok LGBT lebih sering direpresentasikan “buruk”, namun terdapat juga representasi yang berpihak pada kelompok LGBT. Misalnya, kelompok LGBT direpresentasikan secara positif dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam salah satu berita disebut bahwa kelompok LGBT melakukan demonstrasi sebagai tindakan yang demokratis untuk menuntut hak mereka. Selain itu, disebutkan juga bahwa kelompok LGBT rawan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Hal itu juga merupakan bentuk keberpihakan terhadap mereka.

Apa yang direpresentasikan *Detik.com* dalam pemberitaan tentang LGBT merupakan bentuk pelestarian terhadap praksis sosial. Beberapa pemberitaan secara jelas memojokkan kelompok LGBT karena dianggap berbeda dengan kelompok dominan yang sudah mapan dan ada sejak lama. Hal itu menunjukkan bahwa ideologi heteronormatif secara seksual masih mendominasi dalam masyarakat. Heteronormativitas merupakan konstruksi biner yang dipercayai dan dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh masyarakat. Dengan demikian, identitas biner dianggap sebagai identitas gender yang eksklusif.

Adanya eksklusivitas atas gender dan identitas seksual ini ditolak oleh *Queer theory*. Teori ini meyakini bahwa tidak ada identitas yang baku dan stabil. Baik

orientasi seksual, identitas gender, maupun ekspresi gender itu beragam. Teori *Queer* sendiri telah menyatakan bahwa orientasi seksual tidak bisa hanya dipahami melalui salah satu dimensi saja. Baik seks maupun gender berpengaruh untuk mengidentifikasi dan memahami orientasi seseorang atau sekelompok orang (Subobo, 2015:385).

Sebagai media jurnalistik, *Detik.com* memiliki peran yang besar untuk membentuk opini publik, begitu pun dengan mengkonstruksi maupun mendekonstruksi keyakinan masyarakat. Sebagai media yang ideal, orientasi media harus pada kepentingan publik. Apa yang mereka beritakan seharusnya dapat berdampak baik untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk segelintir kelompok saja. Namun, acap kali media dan kekuasaan berkorelasi dalam satu tujuan yang sama: keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan media yang lebih banyak dimiliki oleh para pemilik modal. Maka bukan suatu hal yang mustahil jika media melakukan berbagai cara agar mencapai tujuannya.

Logika media *online* sendiri berfokus pada kecepatan guna menarik pembaca. Hal tersebut dapat diakomodasi dengan jenis penulisan berita *hard news*. Berita *hard news* atau sering juga disebut *straight news* merupakan berita yang ditulis lugas, singkat, dan apa adanya. Tiga tuntutan yang perlu dicapai adalah kecepatan, kelengkapan, dan akurasi. Namun, ketiga tuntutan tersebut sulit untuk dicapai sekaligus karena sifatnya yang bertolak belakang. Jika suatu media mengutamakan kecepatan, maka kelengkapan dan akurasi sering dikorbankan (Tempo Institute, 2019). Hal ini kemudian membuat isu yang sedang dibicarakan, seperti isu LGBT, dalam pemberitaan menjadi tidak penting lagi. Karena tujuan praktis dari pemberitaan di media *online* adalah kecepatan untuk mendapatkan klik (*clickbait*).

Apa yang terjadi kemudian ialah mengorbankan khalayak sebagai ladang uang atau dikomodifikasikan. Komodifikasi adalah upaya mengubah sesuatu menjadi barang dagangan (komoditas) yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Ini merupakan proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar (Prakoso, 2022:147-148). Praktik komodifikasi pada media nampak pada pemberitaan mengenai isu LGBT di *Detik.com*. Tak hanya menarik dan mengundang perdebatan, isu LGBT juga dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik media. Klik pada pemberitaan dapat mengundang pengiklan untuk mengiklankan produknya kepada media yang bersangkutan. Dengan begitu, secara tidak langsung pihak media mendapat keuntungan dari adanya berita-berita tersebut.

Simpulan

Berdasarkan analisis, pemberitaan *Detik.com* mengenai isu LGBT dominan memojokkan kelompok LGBT. Kelompok LGBT masih direpresentasikan sebagai sesuatu yang “menyimpang” dan rentan mengalami diskriminasi. Diantaranya: kelompok LGBT direpresentasikan berbeda dengan masyarakat lain; dianggap sebagai pelaku yang melanggar asusila atau menyimpang; sebagai suatu penyakit dan penyimpangan seksual; sebagai penyebab datangnya azab, keberadaannya terlarang; sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual; dan tidak sesuai dengan budaya dominan. Perlakuan tidak adil yang diterima oleh kelompok LGBT merupakan bentuk pelestarian terhadap praksis sosial yang berkembang di masyarakat. Wacana berupa teks berita mampu mengkonstruksi kepercayaan masyarakat atas identitas dan seksualitas seseorang. Jika arah pemberitaan terus mencoba memojokkan kelompok LGBT sebagai sesuatu yang “abnormal”, bukan tidak mungkin jika wacana itu yang akan terus dipercaya masyarakat sebagai kebenaran.

Pengetahuan mengenai gender dan seksualitas di Indonesia masih didominasi oleh ideologi heteronormatif. Ini menjadi salah satu alasan dan hambatan ketika membahas isu LGBT. Lingkungan inklusif yang menerima keberagaman diperlukan untuk mengatasinya. Baik pemerintah, masyarakat, hingga media memiliki tanggung jawab yang sama atas terciptanya lingkungan inklusif tersebut. Semua orang berhak atas kehidupan yang aman tanpa adanya diskriminasi maupun kekerasan. Oleh sebab itu, sebagai kelompok dengan identitas gender dan seksualitas yang berbeda, tak semestinya kelompok LGBT dipinggirkan dan didiskriminasi. Apalagi dijadikan sebagai komoditas untuk kepentingan memperoleh keuntungan semata.

Daftar Pustaka

- Agustine, S., Sutrisno, E. L., & Candraningrum, D. (2015). Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Ahmad, S. (2018). *Rilis Survei SMRC: Pandangan Publik Nasional tentang LGBT (2016-2017)*. Saiful Mujani Research Center. <https://www.slideshare.net/saidimanahmad/rilis-survei-smrc-pandangan-publik-nasional-tentang-lgbt-20162017>
- Andajani, S., Lubis, D., & Davies, S. G. (2015). Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 20(4).

- Andreski, S. (1989). *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. PT Tiara Wacana.
- Candraningrum, D. (2015). Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression)? *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Christina, A. P. (2019). Konstruksi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Media Online (Analisis Wacana Kritis Konstruksi LGBT di Indonesia pada Web Magazine Magdalene Periode Agustus 2018-Februari 2019). In *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* No Title. PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Garnesia, I. (2019). *Pandangan Terhadap LGBT: Masih Soal Penyakit Sosial dan Agama*. Tirto.Id. https://tirto.id/pandangan-terhadap-lgbt-masih-soal-penyakit-sosial-dan-agama-edju#google_vignette
- Ghiffari, A. (2019). *Mampukah Media Mengubah Stigma Terhadap Kelompok Marjinal?* <https://www.remotivi.or.id/mediapedia/562/mampukah-media-mengubah-stigma-terhadap-kelompok-marjinal>
- Hakim, L. (2021). *Teknik Reportase: Dimensi Teoritis dan Praktis* No Title. Kencana.
- Haryatmoko. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayana, I. M. (2004). Seksualitas dan Gender: Sebuah Pengantar. In *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Program Gender dan Seksualitas FISIP UI.
- Human Rights Watch. (2016). “*Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami*” *Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman*.
- Ishwara, L. (2005). *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. PT Kompas Media Nusantara.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- Melati, N. K. (2015). *Hartoyo: Penting Untuk Merangkul Media Mainstream dalam Isu LGBT*. Jurnalperempuan.Org. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/hartoyo-penting-untuk-merangkul-media-mainstream-dalam-isu-lgbt>

- Muthmainnah, Y. (2015). Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Nabila, A. F., & Surwati, C. H. D. (n.d.). Representasi LGBTQ dalam Film Animasi Disney (Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Representasi LGBTQ [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer] dalam Film Animasi Disney “Raya and the Last Dragon”). *Jurnal Kommas*.
- Noor, I. R. (2004). Relasi Seksual dan Isu Gender. In *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Program Gender dan Seksualitas FISIP UI.
- Papilaya, J. O. (2016). *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*. III(1), 25–34.
- Prakoso, J. H. (2022). Media sebagai Alat Untuk Komunikasi Perspektif Ekonomi Politik Vincent Moscow Dikomodifikasi Oleh Media. *Jurnal Akrab Juara*, 7(2).
- Puspitasari, C. (2020). *Konstruksi Realitas Sosial Media Massa dalam Meliput Kelompok Marjinal di Indonesia (Pemberitaan Kaum Difabel pada Media Online Kompas.com dari Januari sampai November 2019)*. Universitas Multimedia Nusantara.
- Putri, D. (2014). Media Massa dalam Perkembangan Isu Terorisme dan Munculnya Al Qaeda. In *Menuju Teror Media Massa a Road Map to The New Terrorism Era* (Ipusnas, pp. 26–36). CV.Garuda Mas Sejahtera.
- Raviola, M. (2014). Tinjauan Buku: Queer Youth Cultures. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(1).
- Sa’dan, M. (2015). LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Subobo, N. I. (2015). Kata dan Makna. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Tamburaka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Rajawali Pers.
- Tempo Institute. (2019). *Cara Menulis Berita Straight News, Pilih Cepat atau Akurat?* Tempoinstitute.Com. <https://blog.tempoinstitute.com/berita/cara-menulis-berita/>
- Tobing, M. (2018). *Transgender, identitas yang terbuang dari masyarakat*. Alinea. Id. <https://www.alinea.id/media/transgender-identitas-yang-tercerabut-dari-masyarakat-b1Uwe9Qk>

- VOI. (2021). *Orde Baru: Media Mulai Menulis “Oknum” untuk Polisi/TNI Bermasalah*. Voi.Id. <https://voi.id/bernas/94997/orde-baru-media-mulai-menulis-oknum-untuk-polisi-tni-bermasalah>
- Wardhani, W. K. (2019). *Teori Queer Sebagai Alat Pengkritik Norma-norma Tradisional*. Magdalene.Co. <https://magdalene.co/story/teori-queer-sebagai-alat-pengkritik-norma-norma-tradisional>
- Wijaya, H. Y. (2015). Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Wulandari, R. A. (2019). Identitas Homoseksual dalam Novel Tiba Sebelum Berangkat Karya Faisal Oddang (Kajian Teori Queer Judith Butler). *Ejournal Unesa*.
- Yudah, A. A. P. (2013). Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Indonesian Journal of Criminology*, 9(2), 37–49.
- Zakiah, N. R. (2018). Seri Monior dan Dukumentasi 2018: Bahaya Akut Persekusi LGBT. In *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*. <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Monitor-dan-Dokumentasi-Bahaya-Akut-Persekusi-LGBT.pdf>

